

**PROBLEMATIKA BURUH PEREMPUAN**  
*(Studi atas Strategi Survive Perempuan*  
*sebagai buruh kebun PTP XII Desa Sempol Kec. Sempol Kab. Bondowoso)*

Oleh:  
 Mahrus  
 Dosen STAIN Jember

**Abstract**

*A complex poverty problem needs global and coordinated attention from all components. It is connected with poverty society problem, especially the people of Sempol who most of the incomes are taken from field work at PTP XII of coffee and strawberry field.*

*The method used in this research is not only describing the poor women, but also wants to expose meaning behind the poverty. This research is using qualitative method which is conversed with symbolism paradigm.*

*From the research it is concluded that the majority of the women in Sempol village have double role, which is as workers and house-wives that are responsible in house-hold and children caring. It is not easy to be double-role women. There are some problems arise and have to be faced by those women. Efforts that they must do when they are working outside as field-worker at PTPN XII in facing the problems in children caring is by using their limited time in guiding and giving suggestions as much as they can. In order to take care of their children, they are helped by the school teacher in the morning and religion teacher in the afternoon. Furthermore, some of the women also take the advantage of other siblings to take care of their children.*

**Key Words:** Strategi Buruh Perempuan

**PENDAHULUAN**

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Sebab masyarakat miskin dihadapkan pada masalah pemenuhan kebutuhan pokok (primer), seperti papan, sandang dan pangan. Sedangkan kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan rekreasi tidak terpikirkan atau dengan kata lain terabaikan.

Terkait dengan problem yang dihadapi masyarakat miskin, terutama masyarakat Sempol yang sebagian besar menggantungkan penghasilan sebagai buruh kebun, yaitu PTP XII *nota bene*nya kebun kopi dan strawberry. Sedangkan kebutuhan semakin meningkat, sehingga masyarakat Sempol dalam mengatasi masalah kemiskinan mengambil strategi yang beragam.

Akan tetapi bagi tokoh masyarakat

yang dipercaya oleh PTP untuk mengolah tanah tidak begitu risau dalam mengatasi kehidupan yang dirasa berat oleh masyarakat miskin di Desa Sempol. Namun demikian tidak sedikit dari masyarakat Desa Sempol yang memutuskan migrasi ke kota, atau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Bahwa kondisi kemiskinan di desa dan tindakan migrasi yang dilakukan oleh sebagian penduduk desa mengakibatkan para perempuan berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Berdasarkan kondisi realitas dari masyarakat Sempol di atas, maka dirasa perlu untuk mengkaji strategi yang dilakukan perempuan dalam mengatasi kemiskinan dan survive.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bukan hanya sekedar mendeskripsikan perempuan miskin, akan tetapi ingin menguak makna dari kemiskinan itu. Karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertolak dari paradigma simbolisme, sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan hasil penelitian TIM P3M yang dikutip dari (Kigioseobroto, 2000:3, 2001: 20-21) disebutkan pendekatan ataupun paradigma ini dipilih mengingat penelitian ini bukan sekedar mengkaji pola tindakan sosial yang diartikulasikan perempuan secara verbal. Dalam hal ini, pola tindakan perempuan desa tidak terbatas mengerti sebagai realitas obyektif di alam indrawi yang *quantifiable* melainkan sebagai makna-makna (yang terinterpretasi dari berbagai simbol kultural) yang sesungguhnya eksis tidak simbol-simbol itu, melainkan di alam kesadaran dan kepaahaman manusia yang tidak selamanya dapat termanifestasikan secara sempurna di alam indrawi<sup>1</sup>.

Menurut Blumer, pengamatan tersebut akan dilakukan melalui dua model yaitu penjelajahan dan pemeriksaan. Penjelajahan di sini dapat dijadikan metode fleksibel yang memberi peluang bagi peneliti bergerak ke pemahaman yang lebih tepat mengembangkan ide-ide mengenai jalur hubungan bagaimana yang signifikan dan mengembangkan peralatan konseptual seseorang dari sudut pandang yang dipelajari mengenai kehidupan. Tujuan utamanya adalah memperoleh gambaran lebih jelas mengenai sesuatu yang sedang terjadi dalam lapangan subyek penelitian. Hasil penjelajahan ini disebut oleh Blumer sebagai penelaan konsep. "Hal inilah yang memungkinkan untuk ditindak lanjuti pada penyelidikan pemeriksaan lewat metode ini peneliti akan memeriksa konsep-

<sup>1</sup> Wignjoseobroto, Soentandyo. Realitas Sosial Sebagai Obyek Kajian, *Makalah* disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Sekopertais Wilayah IV, Malang Lemlit Unisma Kerjasama dengan Depag RI., 2001.hal.20-21

konsep tersebut melalui pembuktian secara empiris.<sup>2</sup>

Proses pengamatan perempuan miskin di Desa Sempol. Melalui interaksi secara intern dan melalui dialog secara aktif dan sederhana tanpa terstruktur sehingga para informan mengungkapkan pandangannya secara terbuka apa adanya. Adapun yang menjadi informan adalah perempuan miskin yang ada di Desa Sempol. Selanjutnya melakukan refleksi secara kontinyu hasil interaksi dan hasil wawancara. Dalam hal ini siklus interaksi, observasi dan *on going* dan refleksi kritis dijadikan teknik penggalan data.

Dalam proses refleksi, analisis data mulai dikembangkan sejak di lapangan dan setelah di lapangan. Analisis yang digunakan lebih banyak melalui cara-cara partisipatif, yaitu cara-cara yang mengharuskan peneliti memikirkan berbagai strategi *how to get ini, to get along, and at the end to get on* yang lebih memungkinkan peneliti memasuki alam simbolisme para pelaku sosial dalam masyarakat yang diteliti.<sup>3</sup>

### PEMBAHASAN

Perempuan dan kemiskinan bagaikan dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pembangunan, khususnya pembangunan yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh barat. Banyak literatur menyebutkan, bahwa model pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru merupakan model yang dipengaruhi oleh pemikiran Rostow dalam teorinya Rostow mengemukakan bahwa ada lima tahapan pembangunan ekonomi terjadi. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional, berkembang, pra kondisi tinggal landas,

<sup>2</sup> Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, Inc.hal.14-147

<sup>3</sup> Wignjoseobroto, Soentandyo. Realitas Sosial Sebagai Obyek Kajian, *Makalah* disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Sekopertais Wilayah IV, Malang Lemlit Unisma Kerjasama dengan Depag RI., 2001.hal.22

tinggal landas pematangan pertumbuhan dan masyarakat modern.<sup>4</sup>

Masyarakat desa yang cenderung terabaikan dari masyarakat perkotaan, sehingga masyarakat kota tumbuh dengan pesat menjadi kawasan industrialisasi, sementara desa semakin terisolasi. Kekuatan yang tidak merata menjadikan kota sebagai pusat kontrol politik, ekonomi dan budaya. Sementara penduduk desa digiring sebagai buruh di perkebunan dan petani semuanya untuk pasar perkotaan.<sup>5</sup>

Menurut Robert Chambers bahwa inti dari kemiskinan adalah *deprivation trap* (jebakan kekurangan). Yang terdiri dari lima ketidak beruntungan yang melilit orang miskin yaitu : kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Dari kelima jebakan kekurangan ini yang memerlukan perhatian adalah kerentanan dan ketidakberdayaan.<sup>6</sup> Ada dua kategori kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.<sup>7</sup>

Model pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dengan mengadopsi model dari barat menimbulkan dampak kemiskinan yang berbeda bagi laki-laki

dan perempuan. Pembangunan yang teknokratis (Heru Ningroho) dan dominatif. Eksploitatif (Mansur Fakih.) sangat merugikan kaum perempuan. Akibatnya pembangunan yang tidak memperhatikan masalah gender, mempunyai dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan yang jelas lebih memberikan dampak positif bagi laki-laki dibanding perempuan.<sup>8</sup>

Studi lain menunjukkan bahwa modernisasi pertanian yang mengikuti model barat telah membawa kerugian besar bagi perempuan di Jawa, hasil pertanian terutama musim panen membutuhkan tenaga perempuan, akan tetapi setelah datang musim yang merupakan hasil dari teknologi. Banyak program yang dibawa modernisasi pertanian sama sekali tidak menggunakan tenaga perempuan.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian pusat pengembangan sumberdaya wanita (PSPW) diperoleh informasi bahwa jumlah perempuan yang sudah berkeluarga yang hanya mengurus rumah tangga tanpa penghasilan sebanyak 20 persen. Sedangkan istri yang berpenghasilan uang sebanyak 70 persen. Kebanyakan mereka bekerja di sektor informal. Seperti menjual makanan, buruh cuci, membuat kue dan lain-lain. Pada awalnya perempuan tidak menginginkan bekerja pada sektor informal, tetapi keadaan yang memaksa mereka untuk bekerja, menutupi kekurangan kebutuhan keluarga karena penghasilan suami kecil dan tidak menentu. Bahkan sebagian dari mereka menjadi kepala rumah tangga ataupun tulang punggung keluarga karena suami sakit, kena musibah, meninggal dan lain-lain.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Fakih, Mansour. 1999. Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan, Sebuah Pengantar, dalam Eko Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta :Insist dan Remdec.hal.55-56.

<sup>5</sup> Bilbert & Bugler. 1996 : hal. 53

<sup>6</sup> Chambers, Robert. 1983. *Rural Development : Putting The Last First*. New York Logman.hal. 111.

<sup>7</sup> Nugroho, Heru. 2000. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.hal. 30.

<sup>8</sup> Fakih, Mansour. 1999. Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan, Sebuah Pengantar, dalam Eko Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta :Insist dan Remdec.hal.170.

<sup>9</sup> Ibid, hal 290-292

<sup>10</sup> Djamil, Chamsiah. 1996. Membantu Suami, Mengurus Rumah Tangga Perempuan di Sektor Informal, dalam Mayling Oey - Gardiner dkk. (ed.) *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*.

## Problematika Buruh Perempuan .....

Studi tentang kemelaratan (baca kemiskinan) yang melanda kawasan pedesaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan sama sekali dari apa yang disebut dengan pembangunan (*development*). Keduanya memiliki keterkaitan secara dialektik. Satu sisi, pembangunan dihadirkan para pemangku kekuasaan di negeri ini untuk kepentingan mengatasi persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Namun di sisi lain, implementasi pembangunan secara kontra produktif dapat menciptakan dan / atau memperkuat struktur kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pembangunan dan menjadi kebanggaan bangsa, ternyata secara bersamaan juga menjadikan kesenjangan (ekonomi, sosial, dan politik) semakin melebar.<sup>11</sup> Pengangguran, ketidakmerataan, dan kemiskinan absolut bertambah meningkat.<sup>12</sup> Ini merupakan satu contoh kecil betapa pembangunan itu potensial memproduksi kemiskinan.

Banyak studi yang secara kritis menyoroti kemiskinan sebagai realitas paradoks dari pembangunan, misalnya, sosok ilmuwan pribumi kritis ini, cenderung melihat sisi paradigma (ideologi) pembangunan yang diadopsi oleh bangsa Indonesia dinilai sarat dengan bias-bias kapitalisme dari Barat. Keinginan Barat menawarkan konsep pembangunan kepada dunia ketiga bukan didasarkan pada ketulusan untuk benar-benar menolong berjuta-juta rakyat di kawasan bekas koloninya itu agar dapat terbebas dari kemiskinan. Penciptaan pembangunan lebih didasarkan pada kepentingan Barat untuk tetap dapat mempertahankan *status quo* dominasinya dalam

Jakarta : PT Gramedia.hal.232-236).

<sup>11</sup> Susetiawan. 1999. Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial, dalam Moh. Mahfudz dkk. (ed.) *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta : UII Press.hal. 12,

<sup>12</sup> Fakhri, Mansour. 1999. Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan, Sebuah Pengantar, dalam Eko Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta : Insist dan Remdec.hal.55-56, hal.70

melakukan kontrol terhadap dunia ketiga. Karenanya, menjadi jelas bahwa apa yang dimaksud dengan konsep *development* tidak lebih merupakan refleksi paradigma barat tentang perubahan sosial, yakni langkah-langkah menuju *higher modernity*. Modernitas diterjemahkan dalam bentuk teknologi dan pertumbuhan ekonomi mengikuti jejak negara-negara industri mengacu pada revolusi industri.<sup>13</sup>

Pada prakteknya, pemerintah Indonesia sendiri juga sangat terpengaruh oleh ideologi pembangunanisme di tanah air yang ditekankan pada proses-proses perubahan sosial dari tradisional ke modern dengan menitikberatkan industrialisasi sebagai basis supra-strukturnya. Dalam rentang waktu yang cukup panjang, terutama selama periode Orde Baru, langkah demi langkah pembangunan disistematisasikan dalam memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi sebagai prasyarat bagi terciptanya masyarakat modern-industrial tingkat tinggi (*higher modernity*). Apabila dicermati, pentahapan pembangunan yang didesain oleh pemerintah Orde Baru dalam bentuk REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), sangat dipengaruhi percikan pemikiran Rostow yang terkenal dengan teorinya *the five-stage scheme*. Dalam teorinya ini Rostow menjelaskan bagaimana perubahan sosial dalam lima tahapan pembangunan ekonomi terjadi. Tahap pertama, adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan.<sup>14</sup>

Kuatnya pengaruh ideologi pembangunanisme Barat dalam mengkonstruksi model pembangunan di Indonesia, pada saat bersamaan menjadikan usaha *founding father* dan generasi pemangku kekuasaan selanjutnya dalam mempribumisasikan pembangunan dengan cara

<sup>13</sup> Ibid.hal. 270-271

<sup>14</sup> Ibid.hal.25-30.

mengadopsi nilai-nilai modernisasi dari barat yang relevan tanpa mencerabut kharizma lokal, ternyata tidak cukup berhasil. Praksis pembangunan lebih berpihak kepada ideologi pembangunanisme, daripada nilai-nilai lokal-tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ratusan tahun. Bahkan, acapkali implementasi pembangunan dibarengi tindakan kekerasan terhadap masyarakat kecil yang dilakukan aparaturnya dengan dalih menciptakan stabilitas, keamanan, dan ketertiban nasional guna mengamankan program pembangunan. Tindakan semacam ini bersumber dari pandangan para pemangku kekuasaan yang sangat mengganggu ideologi pembangunanisme. Persis seperti logika modernisme, yang memandang nilai-nilai tradisional sebagai penghambat jalannya pembangunan.<sup>15</sup>

Realitas keterpinggiran yang dialami masyarakat pedesaan sehingga kalah maju dibandingkan masyarakat perkotaan, juga tidak bisa dilepaskan sama sekali dari model pembangunan yang cenderung teknokratis dan / atau eksploitatif. Bukan rahasia lagi, kebijakan pembangunan selama ini masih dikonsentrasikan di perkotaan. Terlebih lagi pada saat pembangunan di Indonesia mulai menerapkan industrialisasi. Maka, kota dipandang cukup kondusif bagi penyediaan industrialisasi guna meningkatkan akumulasi modal ataupun pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, kota-kota di Indonesia tumbuh dengan pesat menjadi kawasan yang secara ekonomi sangat menjanjikan. Sementara, desa menjadi semakin terisolasi, termarginalkan, dan terelensi. Kekuatan yang tidak merata menjadikan kota sebagai pusat kontrol politik, ekonomi, dan budaya atas pedesaan. Secara eksploitatif, penduduk desa digeret ke dalam aktivitas-aktivitas baru di pertambangan, perkebunan, atau menjadi petani, dan kesemuanya itu berproduksi untuk pasar-pasar perkotaan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibid.hal.52-55.

<sup>16</sup> Gilbert & Gugler, 1996hal.53.

Sementara itu, kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara desa dan kota melalui modernisasi pertanian atau dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau (*Green Revolution*) juga belum banyak berhasil mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Revolusi hijau yang dijalankan secara teknokratis sebatas membawa dampak perubahan sosial yang instrumentalistik. Dalam jangka pendek, revolusi hijau berhasil meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tetapi, dalam jangka panjang, revolusi hijau tidak banyak membawa keadilan dan kelestarian. Selama Orde Baru, implementasi revolusi hijau dilakukan melalui komando dan subsidi seperti Program Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal) tahun 1970, dan Insus (Intensifikasi Khusus) tahun 1979. Program-program yang diluncurkan ini dibarengi dengan beberapa subsidi, di antaranya (1) bantuan besar-besaran terhadap harga pupuk kimia, (2) subsidi terhadap kredit pertanian, (3) pembayaran gabah oleh negara melalui operasi pembelian dengan harga dasar dan pembangunan stok persediaan, dan (4) meningkatkan kuantitas irigasi serta pinjaman modal melalui utang luar negeri.<sup>17</sup>

Sebagai hasilnya, secara kuantitatif revolusi hijau memang menakutkan. Disatu pihak, pertanian di Jawa mampu memproduksi dua kali lipat padi dari hasil pertanian tahun 60-an. Jawa menyumbangkan lebih dari kontribusi rata-rata kontribusi pangan nasional, dan karena itu memainkan peran utama dalam perubahan status Indonesia dari pengimpor beras terbesar menjadi mandiri pada 1985. Namun secara kualitatif, terdapat berbagai

<sup>17</sup> Fakih, Mansour. 1999. *Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan*, Sebuah Pengantar, dalam Eko Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta :Insist dan Remdec.hal. 277-278

## Problematika Buruh Perempuan .....

persoalan yang berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan di pedesaan, urbanisasi, serta represi politik terhadap kaum tani.<sup>18</sup>

Secara khusus, telaah teoritik mengenai “dampak pembangunan bagi perempuan desa” ini menjadi menarik mengingat persoalan kemiskinan memiliki pertalian dialektik dengan perempuan. Kemiskinan memiliki wajah perempuan, demikian ungkapan beberapa analis sosial. Statemen ini merupakan kesimpulan dalam banyak literatur pembangunan yang melihat bagaimana perempuan tidak terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin / tak punya kekuasaan di dunia, sebagai akibat langsung dari model pembangunan dominan, yang dipromosikan di seluruh kawasan dunia ketiga.<sup>19</sup>

Pengalaman pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dengan mengadopsi model modernisasi dari Barat juga menimbulkan dampak kemiskinan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Model pembangunan yang meminjam istilah Heru Nugroho teknokratis ataupun istilah Mansuur Fakih dominatif eksploitatif itu ternyata sangat merugikan kaum perempuan bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Satu hal yang dianggap bermasalah bukan terletak pada perempuannya, melainkan ideologi yang dianut oleh laki-laki ataupun perempuan yang sangat berpengaruh dalam kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yakni bias gender dalam pembangunan. Akibat dari kebijakan pembangunan yang ‘bias’ atau ‘buta gender’, banyak program pembangunan telah mempunyai dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan terhadap perempuan. Yang pasti, pembangunan lebih memberikan dampak positif bagi laki-laki ketimbang perempuan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibid.hal.278

<sup>19</sup> Morse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Ritka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Belajar.hal.150.

<sup>20</sup> Fakih, Mansour. 1999. *Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan*, Sebuah Pengantar, dalam Eko

Modernisasi pembangunan dalam sektor pertanian, misalnya yang dirancang pemerintah dengan mengikuti model *Green Revolution* (Revolusi Hijau) di Barat tidak hanya bias kapitalisme, tetapi sekaligus juga dapat dikatakan bias gender. Pembangunan model ini jelas-jelas tidak memiliki keberpihakan kepada kaum wanita, malah mungkin hampir tidak ada perempuan sebagai kebijaksanaan yang masuk di dalamnya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun lantas menjadi “sex male bias”. Melupakan bahkan tidak mengindahkan apa-apa yang menjadi kepentingan perempuan. Dalam hal ini, Margaret Mead mengungkapkan bahwa perempuan tidak diberi kesempatan sama dengan laki-laki dalam mengakses teknik-teknik pertanian modern, sebagian karena adanya ‘kepercayaan’ bahwa perempuan tidak dapat menangani mesin-mesin modern. Implikasinya pun cukup jauh, apa-apa yang ditangani oleh perempuan menjadi kurang canggih, kurang prestisius dan juga menjadi kurang penting.<sup>21</sup>

Kondisi demikian telah memarginalisasi pekerjaan perempuan dalam bidang pertanian, dan menyebabkan peningkatan pengangguran dan setengah pengangguran dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan di kalangan pria.<sup>22</sup>

Sementara itu, Irene Tinker yang melihat beberapa literatur mengenai perubahan peran wanita, menunjukkan bagaimana “*Western model middle class bias*” ini telah merasuki pemikiran perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang tidak memberikan peran proporsional terhadap keterlibatan wanita dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan, cenderung mengabaikan arti penting

Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta :Insist dan Remdec.; Bemmelen, dalam Ihromi,hal.186

<sup>21</sup> Raharjo, dalam Ihromi, 1995,hal.3-6

<sup>22</sup> Bemmelen; Sita van. 1995. *Gender dan Pembangunan, Apakah yang Baru?*, dalam T.O. Ihromi (ed. ) *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.hal.187.

dari peran wanita yang secara tradisional dimainkan perempuan di masyarakat dengan perekonomian subsistem.<sup>23</sup>

Apabila dikritisi, *western model* yang bias tersebut sengaja dikonstruksi oleh Barat menjadi *discourse* yang difungsikan sebagai alat dominasi mereka atas negara dunia ketiga. Dalam konteks modernisasi pertanian, *discourse* ini telah menggusur segenap pengetahuan pertanian yang dianggap tradisional. Dan juga menggusur tentunya peran perempuan dalam bidang pertanian yang dianggap tradisional.<sup>24</sup>

Studi lain menunjukkan bahwa modernisasi pertanian yang mengikuti model-model Barat itu telah membawa kerugian besar bagi kaum perempuan. Mekanisasi di bidang pertanian menjadi hilangnya pekerjaan yang selama ini ditekuninya di sekitar pertanian yang ada di desanya. Banyak fakta yang mengungkapkan bahwa kaum perempuan di pedesaan benar-benar menjadi korban modernisasi pertanian. Di Jawa, misalnya, secara tradisional kaum perempuan telah memiliki peran penting dalam produksi, khususnya selama musim panen yang memang membutuhkan tenaga kerja. Kaum perempuan terutama dari keluarga miskin menghidupi keluarga mereka dengan mendapatkan pekerjaan selama panen, dan hal itu menyumbangkan pemasukan yang berarti di rumah tangga mereka. Tetapi, sejak kehadiran modernisasi pertanian yang menggusur modernisasi yang berbasis teknologi modern dalam bidang pertanian secara sistemik telah mengabaikan dan menggusur peran perempuan. Karena,

meskipun total input tenaga diakui lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki, namun teknologi tetap dikontrol oleh kaum laki-laki. Hal ini juga sangat berkebalikan dengan asumsi bahwa laki-laki itu pemimpin rumah tangga dan perempuan sebatas sebagai *kanca wingking*-nya. Sebagai akibatnya banyak program yang dibawa modernisasi pertanian sama sekali tidak menyentuh kaum perempuan.<sup>25</sup>

Dampak lain, tidak sedikit perempuan, terusir dari desanya dan terdampar di perkotaan. Berbekal pendidikan dan keterampilan minim, kaum perempuan desa tidak bisa bersaing dengan komunitas sosial perkotaan yang memiliki bekal pendidikan dan keterampilan memadai dalam memperebutkan pekerjaan di sektor formal. Akibatnya, mereka masuk ke dalam barisan miskin di perkotaan sebagai buruh-buruh murah, pelacur, dan pekerja-pekerja informal yang tidak strategis. Dari hasil penelitian Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) diperoleh informasi bahwa jumlah perempuan yang sudah berkeluarga (isteri) yang hanya mengurus rumah tangga tanpa menghasilkan uang sebanyak 20 persen. Sedangkan, istri yang ikut bekerja dan menghasilkan uang bagi keluarga mereka sebanyak 70 persen. Kebanyakan mereka bekerja di sektor informal. Seperti menjual makanan, buruh cuci, membuat kue dan lain-lain. Pada awalnya perempuan tidak menginginkan bekerja pada sektor informal, tetapi keadaan yang memaksa mereka untuk bekerja, menutupi kekurangan kebutuhan keluarga karena penghasilan suami kecil dan tidak menentu. Bahkan sebagian dari mereka menjadi kepala rumah tangga ataupun tulang punggung keluarga karena suami sakit, kena musibah, meninggal dan lain-lain.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Rahardjo, Yulita. 1995. Perbedaan Antarstudi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita, dalam T.O. Ihroni (ed.) *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hal.3-4.

<sup>24</sup> Fakih, Mansour. 1999. Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan, Sebuah Pengantar, dalam Eko Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta : Insist dan Remdec. hal. 288-290.

<sup>25</sup> Ibid. hal.290-292.

<sup>26</sup> Djamal, Chamsiah. 1996. Membantu Suami, Mengurus Rumah Tangga Perempuan di Sektor Informal, dalam Mayling Oey - Gardiner dkk. (ed.) *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta : PT Gramedia. dalam Gardiner dkk-ed. hal.232-236

## Problematika Buruh Perempuan .....

Hampir setiap hari keluarga miskin di pedesaan bersentuhan dengan suatu realitas sosial bernama kemiskinan. Dalam proses pengumpulannya, perempuan desa sebagai salah satu pilar keluarga miskin, tidak dapat dikatakan pasif ataupun pasrah menerima takdir kemiskinan tanpa melakukan tindakan apapun. Sebaliknya, mereka dapat dikatakan sangat aktif atau dinamis dalam merespon kondisi kehidupannya yang dapat dikategorikan berada dalam kondisi serba kekurangan. Dinamika perempuan dusun ini dapat diamati dari respon praksis yang mereka tunjukkan dalam menjawab persoalan kemiskinan yang membelit keluarganya. Mayoritas perempuan dusun tidak hanya sibuk mengurus rumah tangga, tetapi juga ikut serta mencari nafkah. Bahkan banyak keluarga miskin yang kehidupannya bertumpu pada hasil keringat perempuan.<sup>27</sup>

Tekanan kemiskinan di pedesaan menjadikan sebagian perempuan miskin ada yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri menjadi TKI sebagai pembantu rumah tangga. Sebagian, ada yang melakukan migrasi ataupun urbanisasi ke kota atau daerah lain untuk bekerja di sektor-sektor informal menjadi tukang cuci, pemulung, pelacur, berjualan makanan, membuat kue dan jajanan; dan menjadi pembantu rumah tangga. Menurut banyak analisis sosial, tindakan perempuan dusun, dan masyarakat desa secara umum, melakukan migrasi / urbanisasi dapat diuraikan sebagai pilihan rasional dalam merespon persoalan kemiskinan yang dihadapinya.

Sementara itu, sebagian lagi perempuan yang memutuskan untuk tetap tinggal dan bertahan di pedesaan. Perempuan yang tinggal di pedesaan ini dikarenakan, satu sisi, memang pilihan mereka untuk tetap tinggal di desa daripada melakukan migrasi ataupun urbanisasi, dan disisi lain, barangkali karena suami mereka yang melakukan migrasi. Mayoritas perempuan yang bertahan di desa tidak ada yang berpangku tangan dan sebatas sibuk mengu-

rusi pekerjaan domestik. Mereka semua bekerja membantu suaminya menjadi buruh tani, buruh perkebunan, berternak, berjualan makanan, membuka toko warung kelontong, dan kerja seadanya yang tersedia di desa. Semua itu, dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupan keluarganya.

Dulu, dan boleh jadi masih berlangsung hingga sekarang, strategi perempuan dusun dalam mengatasi masalah ekonomi dilakukan melalui mekanisme sosial-ekonomi yang dikenal dengan gotong royong (*social exchange*). Untuk hal ini, James C. Scott menggunakan istilah etos subsistensi (*subsistence ethics*). Etos ini berakar pada praktek ekonomi dan kegiatan sosial yang bersifat resiprokal dalam masyarakat. Pendapatan yang minim telah mempunyai dampak mendalam terhadap dimensi sosial budaya yang tercermin dalam sikap masyarakat desa. Sedemikian besar pengaruh ekonomi subsistensi terhadap diri petani miskin, sehingga melahirkan norma-norma moral seperti adanya norma resiprokal timbal balik dalam menikmati bantuan sosial, yang ternyata semuanya sebenarnya mempunyai nilai operasional.<sup>28</sup>

Selain itu, terdapat suatu sikap yang dapat disebut secara ekstrim sebagai eksploitasi diri (*self exploitation*) yang dalam bentuk lunaknya oleh Benjamin White disebut *involution*. Dalam hal ini, Gabriel memiliki pandangan senada bahwa eksploitasi dalam pengertian *appropriation of Surplus labor*, petani model ini dianggap sebagai *self exploitation* dalam mode produksi *ancient*. Yang dimaksud dengan mode *ancient* di sini adalah proses dimana setiap individu mengerjakan sawah masing-masing. Mereka hanya memiliki sawah yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan subsistem mereka, yakni *Socially Necessary Labor Time (SNALT)*, dan membayar kewajiban seperti pajak dan sebagainya. Mereka bekerja lebih keras da-

<sup>27</sup> Ibid.hal.234.

<sup>28</sup> Susanto, Astrid S. 1995. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta : Bina Cipta.hal. 20.

lam rangka mempertahankan hidup. Frans Huesken menyebut petani kecil tapi independen ini tidak membeli maupun menjual tenaga kerja. Karena itu, mereka tidak 'mengeskploitasi ataupun dieksploitasi'.<sup>29</sup>

Dalam perspektif teori gerakan sosial, sikap ataupun tindakan yang dilakukan perempuan miskin dalam merespon kemiskinan tersebut dapat dikategorikan sebagai gerakan perlawanan. Secara umum, gerakan perlawanan ini dicirikan oleh adanya sikap tidak senang, menolak dan menentang terhadap situasi yang menantanginya. Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan gerakan-gerakan sosial yang disebut sebagai "gerakan protes". Gerakan protes di pedesaan dapat mengambil bentuk bermacam-macam mulai dari diam yang mengisyaratkan ketidaksukaan terhadap kondisi yang menindas sampai dalam wujudnya yang radikal, seperti gerakan perlawanan dalam bentuk pemberontakan, kekerasan terbuka, bahkan sampai revolusi.<sup>30</sup>

Pemberdayaan merupakan konsep yang masih sangat umum. Banyak pengertian yang dialamatkan kepada konsep tersebut dengan titik tolak ataupun kecenderungan yang beragam. Namun demikian, ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri dapat dipandang sebagai ide yang mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan. Berdasarkan studi kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi

lebih berdaya. Proses ini dapat dilengka-pi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang pertama tadi dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>31</sup>

Kecenderungan kedua itu dalam proses pengembangan idenya banyak dipengaruhi oleh karya Paulo Freire, seorang pakar perldidikan yang radikal dari Brasilia yang memperkenalkan istilah konsientisasi (*conscientization*).<sup>32</sup>

Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara "melihat ke dalam diri sendiri", serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan-hubungan politis, ekonomi dan sosial. Seseorang menganalisis sendiri masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru. Konsientisasi merupakan sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Analisis reality harus dilakukan oleh orang yang dapat memutuskan sendiri apa kebutuhan dan pengalaman yang penting baginya, dari bukan diputuskan oleh orang lain atau para pakar. Melalui analisis semacam ini, orang mampu mengambil tindakan sendiri untuk menentang unsur oppresive dari realitasnya, termasuk di dalamnya pemecahan (pematahan) hubungan antara subyek dan obyek untuk kemudian membentuk esensi parti-

<sup>29</sup> Fakhri, Mansour. 1999. *Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan*, Sebuah Pengantar, dalam Eko Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta :Insist dan Remdec.hal.281-282.

<sup>30</sup> Sartono, Kartodirdjo. 1973. *Protes Womovement in Rural Java : A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Singapore Oxford University Press.hal. 5-6

<sup>31</sup> A.M. W Pranaka, dalam Onny S. Prijono & A.M. W Pranaka, 1996hal. 67.

<sup>32</sup> Freire, Paulo. 1972. *Pedagogy of the Oppressed*. London: Penguin.hal.13.

## Problematika Buruh Perempuan .....

sipasi yang sungguh-sungguh.

Pemikiran yang digagas Paulo Freire di atas kemudian mengilhami, memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan yang sekaligus membawa dampak baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan. Termasuk dalam literatur pembangunan pun, makna pembangunan mulai mengalami pergeseran ke arah penekanan legitimasi kekuatan rakyat. Literatur terbaru mengenai pembangunan, misalnya, secara substansial melihat suatu pendekatan alternatif yang berfokus tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan, tetapi juga memampukan mereka untuk mengawasinya guna melindungi kepentingan mereka. Dalam hal ini, "pembangunan alternatif" menekankan keutamaan politik untuk melindungi kepentingan rakyat. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan alternatif adalah untuk memansuhkan sistem yang membungkam mereka dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan bentuk-bentuk perlawanan dan perjuangan politik yang menekankan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara yang tersingkir.<sup>34</sup>

Senafas dengan ide pemberdayaan Freire, Hulme dan Turner, berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi diri bergerak dari korban (*victim*)

<sup>34</sup> A.M.W Pranarka, dalam Onny S. Prijono & A.M.W Pranarka, 1996, hal.9.

ke pelaku (*agent*) karena orang mampu bertindak dalam arena sosial politik berusaha memenuhi kepentingannya.<sup>34</sup>

Pearse dan Stiefel menekankan pemberdayaan pada penghormatan terhadap kebhinekaan (pluralitas), kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian. Ini sernua dimasukkan ke dalam kategori bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Pemikir lain, Paul, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasilnya pembangunan".<sup>35</sup>

Lantas bagaimana sebaiknya pemberdayaan terhadap kaum perempuan miskin itu dilakukan? Pemberdayaan terhadap komunitas sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut di atas. Proses pengalihan atau pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuatan, menjadikan komunitas yang diberdayakan (kaum perempuan) sebagai subyek (*agent*) dalam aksi pemberdayaan sehingga memiliki kapasitas untuk mengontrol kehidupannya tanpa banyak dieksploitasi, didominasi ataupun dihegemoni kekuatan lain, merupakan bagian dari prinsip-prinsip dasar pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Dalam konteks ini, Karl (1995) memandang pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan.

Hal senada disampaikan Vargas (1991) bahwa pemberdayaan perempuan menyangkut perolehan suara, mobilitas, dan penampilan di depan umum. Meskipun perempuan mampu memberdayakan dirinya melalui pengawasan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari, tetapi

<sup>34</sup> Shragge, 1993, hal.....

<sup>35</sup> A. M. W Pranarka, dalam Onny S Prijono & A. M. W Pranarka, 1996, hal.63

pemberdayaan juga menyarankan perlunya memperoleh pengawasan terhadap "struktur kekuasaan" atau bahkan mengubahnya. Penulis lain, Sen dan Grown (1987) menganggap pemberdayaan sebagai alat untuk mencapai tujuan (*a means to an end*). Menurut kedua penulis ini., organisasi perempuan harus memperkuat kapasitas organisasi mereka serta mengkritik visi dan perspektif yang mampu mengubah keadaan mereka saat ini. Mengembangkan kemauan politik bagi suatu perubahan besar sangat diperlukan di dalam masyarakat. Untuk itu, organisasi dituntut agar memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan-perubahan tersebut.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan hal-hal yang perlu dilakukan pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek tuples karena proyek ini akan mendatangkan penranferan sumber-sumber dana dari pusat ke daerah. Kedua, mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi dan sebagainya. Ketiga, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat bawah seperti Kupedes, KURK, BKK, KCK, Kredit Bimas dan sebagainya. Keempat, pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya pembangunan pertanian. Kelima, pengembangan kelembagaan seperti program pengembangan wilayah (PPW) pengembangan kawasan terpadu (PKT) program peningkatan pendapatan petani kecil (P4KT) dan lain-lain. Program pengentasan lapisan masyarakat miskin lainnya seperti IDT dan lain-lain.<sup>36</sup>

Dalam konsep Islam strategi untuk menanggulangi kemiskinan pertama bekerja setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja. *Kedua* mencukupi keluarga yang lemah. Sudah menjadi dasar pokok di dalam syariat Islam bahwa setiap individu harus

memerangi kemiskinan dengan cara saling membantu antar sesama. *Ketiga* zakat, Islam mengajarkan bagi yang berkelebihan harta untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang miskin dan masih banyak lagi hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>37</sup>

## HASIL PENELITIAN

Kabupaten Bondowoso memiliki ketinggian rata-rata mencapai 253 m di atas permukaan air laut. Wilayah tertinggi 475 m dan terendah 73 m. Adapun jarak dari ibu kota propinsi adalah  $\pm$  230 km

Sekarang ini, Bondowoso tidak dapat dikatakan sebagai daerah dengan corak penduduknya yang homogen, melainkan heterogen. Banyak penduduk dengan latar etnik beragam berada dan bahkan tinggal menetap di kawasan ini. Namun demikian, mayoritas etnik yang menjadi penduduk Bondowoso adalah Madura dan Jawa menempati peringkat kedua. Dari hasil registrasi penduduk tahun 2006, jumlah penduduk Bondowoso sudah mencapai 708.683 jiwa, terdiri dari 334.137 laki-laki dan 364.546 perempuan. Dari data ini dapat dibaca dengan jelas bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan sex ratio 94, 40 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan mendapat 94 penduduk laki-laki.

Status perekonomian Bondowoso mengalami persebaran yang tidak merata. Sebagian besar penduduk Bandowoso bidang perekonomiannya bercorak agraris. Diversifikasi perekonomian penduduk dapat diklasifikasikan ke dalam sektor pertanian mencapai 48.63 %; pertambangan dan penggalian 0.19 %, industri pengolahan 8.25 %, listrik, gas dan air bersih 0.51 %, perdagangan, hotel dan restoran 16.22 %, pengangkutan dan komunikasi 3.04 % keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10.09 % dan jasa-jasa. Jadi sektor pertanian menempati peringkat teratas dari total pendapatan daerah Kabupaten

<sup>36</sup> Nugroho, Heru. 2000. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.hal.hal.28.

<sup>37</sup> Yusuf Qardawi, 1996,hal.52-99

## Problematika Buruh Perempuan .....

Bondowoso. Sedangkan sektor kehidupan ekonomi yang memberikan kontribusinya paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Data ini dapat diinterpretasikan bahwa meskipun sektor perekonomian penduduk Bondowoso cenderung mengalami persebaran yang heterogen, namun belum mengalami perimbangan antar berbagai sektor kehidupan ekonomi. Sektor dominan dalam kehidupan ekonomi masih ditempati pertanian. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan sebagian besar penduduk terhadap tanah agraris masih cukup kuat.

Sektor agraris ini kebanyakan dikuasai oleh penduduk pribumi Rata-rata mereka memiliki skill dan kemampuan rendah dalam mengelola lahan pertanian, sehingga hasil pertanian yang mereka dapatkan kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak, kesehatan dan lain-lain. Di samping pula, penguasaan mereka terhadap tanah pertanian dan perkebunan relatif kecil. Tanah pertanian yang luas hanya dimiliki segelintir orang saja; sementara tidak sedikit dari penduduk yang bekerja di sektor agraris sebagai pekerja atau buruh tani. Masih banyaknya warga masyarakat Bondowoso yang tergolong kurang mampu baik di kawasan perkotaan; pinggiran kota, maupun di pedesaan inilah yang mendorong sebagian orang tua untuk menitipkan san memasukkan anaknya ke dalam pendidikan pesantren. Dalam beberapa observasi yang dilakukan peneliti, beberapa pesantren baik di perkotaan, pinggiran kota, apalagi pedesaan yang menampung anak-anak yang kurang mampu untuk dibina dalam pendidikan pesantren yang diasuh seorang kyai.

Sedangkan sektor ekonomi dan sumber daya alam strategis didominasi oleh penduduk non pribumi terutamanya etnis Cina. Meskipun jumlah mereka kecil, namun tingkat kesejahteraan dan kemakmuran mereka terjamin. Mereka tidak saja mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terkait dengan kebutuhan pendidikan anak-anak, kesehatan, hiburan dan

lain-lain dapat dipenuhi dengan mudah. Pandangan kontras ini memang tampak cukup mencolok di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan atau pinggiran tidak tampak perbedaan antara kelompok warga masyarakat pribumi dan pendatang. Yang mencolok di kawasan pedesaan biasanya antara warga kaya dan warga yang miskin di mana mereka sama-sama penduduk pribumi (WNI). Meski terjadi perbedaan tajam dalam sektor perekonomian; dalam aspek tata kehidupan sosial di daerah ini tidak terjadi banyak masalah seperti konflik atau kerawanan sosial.

Pembangunan di sektor pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Bahkan, sektor pendidikan dan juga kesehatan selama beberapa tahun terakhir ini menjadi sektor kehidupan yang paling diprioritaskan. Berbagai sarana pendidikan baik untuk pendidikan formal maupun informal terus ditingkatkan. Seiring dengan dengan semakin tersedianya sarana pendidikan dan biaya pendidikan yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, turut meningkatkan pertumbuhan institusi / lembaga pendidikan, berikut jumlah guru, murid dan tingkat partisipasi sekolah dalam berbagai kegiatannya.

Di Kabupaten Bondowoso ini berbagai jenis dan jenjang pendidikan tersedia mulai dari lembaga pendidikan formal umum mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, pendidikan pesantren dan pendidikan luar sekolah. Di daerah ini juga sudah berdiri tiga lembaga perguruan tinggi yaitu Universitas Bondowoso (Unibo), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITD), Pendidikan Tarbiyah Al Islah, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa.

Sementara itu; keberadaan lembaga pendidikan pesantren di daerah ini menempati posisi yang cukup istimewa. Kecenderungan orang tua dalam menentukan pendidikan anak-anaknya ke lembaga pendidikan pesantren memang didorong oleh beberapa hal. Pendidikan orang tua yang rata-rata berasal dari (alumni) pe-

santren adalah salah satu faktor determinan (*determinan factor*) kenapa mereka lebih suka menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren.

Namun demikian, satu hal yang pasti ialah bahwa perkembangan pendidikan baik pesantren salafiyah, pendidikan formal berbasis pesantren dan pendidikan formal non-pesantren yang dari tahun ke tahun tumbuh semakin pesat merupakan modal sosial tersendiri bagi daerah ini untuk mendapatkan perhatian, pembinaan, dan pengelolaan secara baik, merata, dan memadai. Sebab, lembaga-lembaga pendidikan ini merupakan asset yang cukup berharga dalam melahirkan SDM (out put) yang berkualitas yang sangat bermanfaat bagi keberhasilan pembangunan daerah Bondowoso sekarang ini dan mendatang, terutama dalam era otonomi daerah.

Pembangunan dalam bidang agama di Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan baik. Toleransi antar pemeluk agama yang berbeda keyakinan tidak banyak menimbulkan kerawanan atau konflik sosial bernuansa agama.

Secara sosiologis, masyarakat Bondowoso adalah masyarakat yang plural baik dari segi etnik, bahasa, agama dan kepercayaan, pendidikan, ekonomi dan budayanya. Sebagai masyarakat santri, mayoritas masyarakat Bondowoso menganut agama Islam dengan madzhab Ahlus Sunnuh wal Jama'ah. Secara *jama'ah* (komunitas) dan *jam'iyah* (organisasional), mereka adalah komunitas Islam tradisional atau warga *nahdliyin* dengan organisasinya Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, kultur dominan yang kemudian terbentuk adalah kultur Islam tradisional yang memiliki karakter antara lain fanatis terhadap agama dan arau kepercayaan keagamaan yang dianutnya, dan memiliki penghormatan dan kepatuhan yang tinggi terhadap ulama atau kyai. Hubungan kyai dengan santri atau umat yang erat semacam ini yang kemudian santri, keberadaan kyai dipandang kharismatik dan figure kepemimpinan non-formal yang sangat disegani dan dihormati dibanding-

kan dengan pemimpin formal yang ada di wilayah pemerintahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian dan analisis data secara umum dapat disimpulkan bahwa mayoritas perempuan di desa Sempol, memerankan peran ganda yakni sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dan sebagai ibu bekerja yang bekerja di PTPN XII Sempol untuk menopang ekonomi keluarga. Secara khusus dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Perempuan di desa Sempol, meskipun memerankan peran ganda yakni seorang ibu yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga yang juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, namun cukup mampu memerankan kedua peran tersebut dengan baik.

Strategi yang dilakukan oleh Ibu yang bekerja di luar rumah (sebagai buruh di PTPN XII) dalam menghadapi problem mendidik anak-anaknya adalah dengan waktu yang tersisa umumnya mereka selalu memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat semaksimal mungkin. Untuk pengawasan anak-anaknya, mereka menyerahkan pada guru di sekolah pagi hari dan guru ngaji pada sore harinya, dan bagi yang memiliki keluarga / saudara seperti nenek, bibi atau kerabat dekat yang lainnya, umumnya pada saat di rumah anak-anak ditiptkan kepada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wignjosuebrot, Soentandyo. Realitas Sosial Sebagai Obyek Kajian, *Makalah* disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Se-Kopertais Wilayah IV, Malang Lemlit Unisma Kerjasama dengan Depag RI., 2001.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symblic*

## Problematika Buruh Perempuan .....

- Interactionism : Perspective and Method.* Englewood Cliffs, N.J : Prentice - Hall, Inc.
- Fakih, Mansour. 1999. *Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan, Sebuah Pengantar*, dalam Eko Prasetyo (ed.) *Gender dan Perubahan Organisasi : Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik.* Yogyakarta :Insist dan Remdec.
- Bilbert & Bugler. 1996.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development : Putting The Last First.* New York Logman.
- Nugroho, Heru. 2000. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Morse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan.* Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Centre don Pustaka Belajar.
- Bemmelen; Sita van. 1995. *Gender dan Pembangunan, Apakah yang Baru?*, dalam T.O. Ihromi (ed. ) *Kajian Wanita dalam Pembangunan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, Yulfita. 1995. *Perbedaan Antarstudi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita*, dalam T.O. Ihroni (ed.) *Kajian Wanita dalam Pembangunan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Djamal, Chamsiah. 1996. *Membantu Suami, Mengurus Rumah Tangga Perempuan di Sektor Informal*, dalam Mayling Oey - Gardiner dkk. (ed.) *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini.* Jakarta : PT Gramedia.dalam Gardiner dkk-ed.
- Susanto, Astrid S. 1995. *Sosiologi Pembangunan.* Jakarta : Bina Cipta.
- Sartono, Kartodirdjo. 1973. *Protes Wovement in Rural Java : A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.* Singapore Oxford University Press.hal. 5-6
- Morse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan.* Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Centre don Pustaka Belajar.hal.150.
- A.M. W Pranaka, dalam Onny S. Prijono & A.M. W Pranaka, 1996hal. 67.
- Freire, Paulo. 1972. *Pedagogy of the Oppressed.* London: Penguin.hal.13.